



RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN WAJO TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja %
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,56	73,98	0,571%
2	Angka Kemiskinan	6,73	6,47	-3,863%
3	Angka Pengangguran	2,10	2,31	10%
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,43	4,52	216,08%
5	Pendapatan Per Kapita	63.612	66.711	4,872%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,362	0,369	1,934%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Makro diatas dapat dijelaskan masing-masing indicator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Menurut metodologi baru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui pendekatan tiga Dimensi dasar yaitu Dimensi kesehatan melalui Umur Harapan Hidup; Dimensi pendidikan yang terdiri dari *Harapan Lama Sekolah* dan *Rata- Rata Lama Sekolah*; dan Dimensi Hidup Layak yang dihitung dari *Pengeluaran per kapita Disesuaikan*.

Berikut komponen pembentuk IPM kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir:

Tabel 2.2
Komponen Pembentuk IPM

NO	KOMPONEN	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup	73,25	73,47
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31	13,32
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,45	7,46
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	13.192	13.608

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Prov. Sulawesi Selatan, BPS 2025

IPM Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi. Pada tahun 2024, nilai IPM sebesar 73,98. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,42 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,56. Pada saat ini IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”, karena termasuk dalam *range* $60 \leq \text{IPM} < 70$.

2. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur Angka kemiskinan dalam suatu kabupaten kota digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran dari perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel. 2.3
Indikator Perkembangan Kemiskinan
Kabupaten Wajo 2023 – 2024

Indikator	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	27,54	26,57
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,34	1,02
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,22
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,73	6,47
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	402.351	431.291

Sumber : Wajo Dalam Angka Triwulan 4 2024, BPS 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo menurun selama periode 2023 – 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada dalam 2 Tahun terakhir mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,34 di tahun 2023 sedangkan tahun 2024 turun menjadi 1,02 .

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,43 pada Tahun 2023, di Tahun 2024 Menurun menjadi 0,22. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin menurun.

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pada Tahun 2024 angka pengangguran Terbuka pada Kabupaten Wajo meningkat dimana pada tahun 2023 angka pengangguran sebesar 2,10% meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,31 %.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dari tahun t-1 ke tahun t yang diukur berdasarkan pdrb atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2023 mengalami peningkatan seiring dengan lapangan usaha pertanian yang mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mencapai 1,43 dan ditahun 2024 naik menjadi 4,52.

Secara umum pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Wajo naik sebesar 4,52% seiring dengan Lapangan Usaha Potensial Kabupaten Wajo serta pada sektor pertambangan dan konstruksi mengalami pertumbuhan yang positif dan hal ini juga ditopang oleh perdagangan yang meningkat cukup signifikan.

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita diukur dari dihitung berdasarkan PDRB per kapita berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Dimana PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per Kapita Kabupaten Wajo cenderung meningkat sebesar 0,28 % dari 63,612 pada Tahun 2023 menjadi 66,711 pada Tahun 2024. Yang artinya dari sisi lapangan usaha 1 orang penduduk dapat menciptakan pendapatan sebesar 66,711 juta rupiah per tahun.

6. Ketimpangan Pendapatan

Gini rasio merupakan alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan antara kumulatif distribusi penduduk dengan kumulatif distribusi pendapatan disuatu wilayah. Gini rasio bernilai 0 sampai 1 dimana Ketika nilainya mendekati 0 maka menunjukkan pendapatan semakin merata dan Ketika mendekati 1 menunjukkan pendapatan semakin timpang, Gini rasio kurang dari 0,4 menunjukkan pendapatan rendah, gini rasio 0,4 sampai 0,5 menunjukkan ketimpangan pendapatan sedang, sementara gini rasio lebih dari 0.5 menunjukkan ketimpangan pendapatan tinggi.

Perlu digaris bawahi bahwa gini rasio hanya digunakan untuk menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan secara umum dan tidak bisa mengungkapkan identitas individu ataupun kelompok individu mana yang memiliki penghasilan tinggi ataupun rendah. Selain itu ketidakmerataan tersebut tidak bisa diketahui secara spesifik bidang apa yang paling tidak merata.

Gini ratio Kabupaten Wajo Tahun 2023 sebesar 0,362 sedangkan tahun 2024 sebesar 0,369. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Tingkat ketimpangan

pendapatan penduduk Kabupaten Wajo masih tergolong rendah. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan Gini ratio sebesar 0,007 poin dari tahun 2023, hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Ketimpangan ini bisa terjadi karena berbagi factor seperti ketimpangan kesempatan, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, ataupun ketimpangan ketahanan ekonomi. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan akses sumber daya bagi Sebagian masyarakat.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Wajo tahun 2023 memuat capaian kinerja kunci outcome sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan Urusan Pendidikan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87,29 %	76,05 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,82 %	91,17 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81,61 %	75,09 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	21,79 %	32,87 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 dengan realisasi belanja sebesar Rp **377.514.121.321,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Dasar.
 - b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sajian data terkait anak tidak mampu, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, dan tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 / DIV tidak terpenuhi dengan baik.
2. Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai,
3. Alokasi anggaran belum maksimal.

2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan Urusan Kesehatan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Kesehatan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,57 %	1,65 %
2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100 %	100 %
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,88 %	92,28 %
4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	99,44%	89,40 %
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	93,36 %
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,97 %	100 %
7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %	82,07 %
8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,95%	102,97 %
9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,91%	108,11 %

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,92%	97,89 %
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100 %
12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100 %
13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100 %
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Kabupaten Wajo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. **335.327.130.055,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 - b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, *dengan kegiatan* :
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa Program terkait tidak menganggarkan pelaksanaan Pelayanan Urusan Kesehatan ;
2. Masih ada ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal dan standar pelayanan karena alasan pekerjaan;
3. P4K tidak berjalan secara maksimal;
4. Sistem Pencatatan Pelayanan melalui Aplikasi E Kohort belum berjalan maksimal;
5. Masih adanya Persalinan No Nakes dan Non Faskes;
6. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil masih perlu dimaksimalkan secara kualitas dan kuantitas;
7. Masih adanya sasaran yang tidak berkunjung ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.
8. Masih ada Puskesmas yang belum secara Terpadu dalam Melaksanakan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Sekolah;
9. Ketersediaan Buku Lansia yang tidak sesuai dengan jumlah sasaran;
10. Masih Adanya Keterlambatan Pengimputan Data di Akibatkan Oleh, Kurangnya Sarana Misalnya Laptop dan Jaringan Internet.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welenna Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)	

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welennae Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	92,71 %	92,91 %
4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	90,92 %	91,04 %
5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92%	92 %
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	53,67 %
7	Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	48,76%	42,05%
8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	35,61%	70,19 %
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100 %

Sumber : Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wajo Tahun 2024 Sebesar Rp **95.448.619.855,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan :*
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3. *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan :*
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan :*
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
5. *Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan :*
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6. *Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan :*
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
7. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan :*
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
8. *Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan :*
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
9. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.*

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait penerapan SPM kepada personil dari OPD/Instansi/Lembaga pelaksana belum optimal.
2. Keterbatasan anggaran Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan SPAM serta Berakhirnya Program PAMSIMAS Tahun 2024.
3. Pemeliharaan sarana prasarana air minum di tingkat masyarakat belum optimal.
4. Terdapat lokasi perdesaan yang tidak memiliki sumber air minum layak.
5. Masih terdapat Lembaga Pengelola SPAM yang kinerjanya belum optimal.
6. Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air Limbah Domestik.
7. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) belum diperbaharui.
8. PraSarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum berfungsi optimal.
9. Pemeliharaan sarana prasarana air Limbah Domestik di tingkat masyarakat belum optimal.
10. Masih terdapat sarana air limbah di tingkat masyarakat yang belum memiliki Lembaga pengelola.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada Relokasi diTahun 2023	Tidak ada Relokasi diTahun 2024
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	63,81 %	4,63 %
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,89%	6,98 %
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	45,51%	45,51 %

Sumber : Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wajo tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wajo Tahun 2024 Sebesar Rp **7.583.388.313,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. *Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :*
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. *Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :*
 - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
3. *Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan :*
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
4. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.*

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Penanganan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan atau relokasi program kab/kota sehingga belum semua rumah yang terkena bencana dapat tertangani.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai dalam mendukung kelancaran kegiatan antara lain tidak tersedianya Kendaraan operasional khusus dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah belum dicapai karena adanya kendala yang dihadapi adalah belum adanya pencadangan akses lahan yang bersertifikat Pemda dikhususkan bagi pembangunan rumah khusus beserta PSU (Relokasi) untuk memenuhi standar pelayanan dasar ini dan terdapat lokasi yang berada di daerah sempadan sungai yang merupakan lokasi yang perlu di relokasi namun telah diintervensi oleh dana program kotaku dalam penyediaan prasarana dan sarana dan diperkuat oleh aspek social budaya masyarakat sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100 %
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %
3	Mengukur Informasi jangkauan rawan bencana	100%	64 %
4	Mengukur jangkauan layanan penceahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	94,10%	2 %
5	Mengukur layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	100 %
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	80,88 %
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,44 Menit	13 Menit

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Wajo tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wajo Tahun 2024 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo dengan pagu Anggaran total sebesar Rp **15.629.722.227** ,- dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.**10.366.686.306**,-, dengan Program dan Kegiatan :
 1. *Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, dengan kegiatan :
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
 2. *Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*, dengan kegiatan :
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan.
 - b. Inspeksi Kejadian Kebakaran
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
 3. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.406.475.741**,- dengan Program dan Kegiatan :
 1. *Program Penanggulangan Bencana*, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 2. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten*.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam dengan Permasalahan yaitu:
 1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sub kebakaran.
 2. Masih kurangnya pemahaman terkait pengumpulan data, cara pemenuhan kebutuhan dan pengintegrasian ke dokumen perencanaan.
 3. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
 4. Masih kurangnya jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP.
 5. Kurangnya anggota pemadam yang bersertifikat sesuai standar kualifikasi pemadam.

6. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara trantibum serta penanganan kebakaran secara dini.
 7. Belum maksimalnya penguatan kerjasama dengan stakeholder/unit terkait
- Badan Penanggulangan Bencana untuk urusan kebencanaan dengan permasalahan yaitu :
 1. Kurangnya SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana
 2. Masih banyak aparat kebencanaan yang belum terlatih.
 3. Luasnya daerah rawan bencana di Kabupaten Wajo Tahun 2024.
 4. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori tinggi.
 5. Alokasi anggaran yang minim untuk Badan Penanggulangan Bencana tidak memungkinkan untuk pencapaian urusan.

6. URUSAN SOSIAL .

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian penyelenggaraan Urusan Sosial berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	38,66%	61,24 %
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100 %

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi belanja sebesar Rp **8.231.665.315,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

2. *Program Rehabilitasi Sosial*, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti.
3. *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*, dengan kegiatan :
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
4. *Program Penanganan Bencana*, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota.
 - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
5. *Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan*, dengan kegiatan :
 - a. *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.*

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan SPM khususnya pada bidang Sosial.
2. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Wajo mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,4827 dengan status kinerja Rendah dan Hasil EPPD Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 belum diketahui dikarenakan Kementerian Dalam Negeri Belum Merilis.

2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 39.A./LHP/XIX-MKS/05/2024, Kabupaten Wajo berhasil mendapatkan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 yang berarti bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Unaudited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Wajo Tahun 2024 Mencapai sebesar Rp. **1.584.066.324.147,16** dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 mencapai Rp. **1.564.080.788.044,60,-**

Secara rinci , rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.610.937.508.095,13	1.584.066.324.147,16	98,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.442.046.339,13	185.825.438.795,16	100,21
4.1.01	Pajak Daerah	53.228.993.120,00	54.652.419.370,00	102,67
4.1.02	Retribusi Daerah	13.112.323.450,13	10.996.690.771,00	83,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.000.000.000,00	18.228.799.647,00	101,27
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.100.729.769,00	101.947.529.007,16	100,84
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	185.442.046.339,13	185.825.438.795,16	100,21
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.359.381.392,00	1.379.104.804.988,00	98,06
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.197.670.891.857,00	1.191.260.344.054,00	99,46
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	48.184.472.000,00	53.217.445.994,00	110,45
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	771.791.997.000,00	771.791.832.501,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.604.171.000,00	164.662.171.304,00	97,09
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	208.090.251.857,00	201.588.894.255,00	96,88
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.197.670.891.857,00	1.191.260.344.054,00	99,46
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	119.866.581.000,00	119.866.580.500,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	119.866.581.000,00	119.866.580.500,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.821.908.535,00	67.977.880.434,00	76,53
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	83.821.908.535,00	64.358.193.434,00	76,78
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	3.619.687.000,00	72,39
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	88.821.908.535,00	67.977.880.434,00	76,53
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.406.359.381.392,00	1.379.104.804.988,00	98,06
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.136.080.364,00	19.136.080.364,00	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.596.913.000,00	13.596.913.000,00	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.539.167.364,00	5.539.167.364,00	100,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.136.080.364,00	19.136.080.364,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.610.937.508.095,13	1.584.066.324.147,16	98,33

5	BELANJA DAERAH	1.707.572.811.122,00	1.564.080.788.044,60	91,60
5.1	BELANJA OPERASI	1.204.791.368.019,00	1.099.025.972.574,60	91,22
5.1.01	Belanja Pegawai	709.280.930.907,00	665.721.599.217,00	93,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.402.792.159,00	387.129.094.050,60	87,31
5.1.03	Belanja Bunga	616.628.248,00	616.628.248,00	100,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.886.016.705,00	44.953.651.059,00	88,34
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.204.791.368.019,00	1.099.025.972.574,60	91,22
5.2	BELANJA MODAL	286.503.396.303,00	255.517.944.294,00	89,18
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.172.568.000,00	137.568.000,00	11,73
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.055.608.088,00	46.267.483.226,00	87,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.774.148.395,00	111.321.187.769,00	95,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.295.111.495,00	91.682.071.729,00	86,25
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.205.960.325,00	6.109.633.570,00	66,37
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	286.503.396.303,00	255.517.944.294,00	89,18
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.987.483.000,00	2.617.300.700,00	29,12
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.987.483.000,00	2.617.300.700,00	29,12
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	8.987.483.000,00	2.617.300.700,00	29,12
5.4	BELANJA TRANSFER	207.290.563.800,00	206.919.570.476,00	99,82
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.788.731.300,00	5.510.894.900,00	95,20
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.862.577.100,00	1.776.816.000,00	95,40
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	199.639.255.400,00	199.631.859.576,00	100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	207.290.563.800,00	206.919.570.476,00	99,82
	JUMLAH BELANJA	1.707.572.811.122,00	1.564.080.788.044,60	91,60
	SURPLUS/DEFISIT	(96.635.303.026,87)	19.985.536.102,56	(20,64)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	96.635.303.026,87	96.635.303.026,87	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.258.573.442,87	126.258.573.442,87	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.258.573.442,87	126.258.573.442,87	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.258.573.442,87	126.258.573.442,87	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.623.270.416,00	29.623.270.416,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	24.623.270.416,00	24.623.270.416,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.623.270.416,00	29.623.270.416,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	96.635.303.026,87	96.635.303.026,87	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	116.620.839.129,43	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo Tahun 2024 (Unaudited)

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Wajo memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	SMA 1 WAJO (Sma1.Kabupatenwajo)	Mewujudkan Pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Yang Bermakna Melalui Strategi Modis Perkusi (Modifikasi, Diseminasi, Penyamaan Persepsi, Kontrol, Evaluasi)	Inovasi Lainnya
2	Aryan (Aryan.Kabupatenwajo)	Biota (Biodegradable Root Trainer) : Pengolahan Feses Sapi Potong Sebagai Root Trainer Untuk Media Pembibitan Tanaman Radix Primaria	Inovasi Lainnya
3	Bakti Nuda Nusantara (Baktimudanusantara)	Pesona Bsf Kompak (Pengolahan Sampah Organik Dapur Dengan Bantuan Maggot Bsf Menjadi Kompos Dan Pakan Ternak Alternatif)	Inovasi Lainnya
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud.Kabupatenwajo)	Gerbang Atap Sekolah (Gerakan Membangun Kesadaran Anak Tidak Sekolah Dan Anak Putus Sekolah	Inovasi Lainnya
5	DINAS PERHUBUNGAN (Dishub.Kabupatenwajo)	Inovasi Rudal Covid	Pelayanan Publik
6	Sri Fadhillah (Fadhillah77)	GASSKAN (Gerakan Santri Sadar Kesehatan)	Pelayanan Publik
7	SD 104 ABBANUANGGE (Sd 104 Abbanuangge)	PAK SABIR (Penguatan Akhlak Dan Karakter Sabtu Berzikir)	Pelayanan Publik
8	PUSKESMAS LIU (Puskesmasliu)	PANADA'S (Pemetaan Berbasis Data Kesehata	Pelayanan Publik
9	SDN 107 Peneki (Sdn107peneki)	GARUDAKITE	Pelayanan Publik
10	Puskesmas Siwa (Puskesmassiwa.Kabupatenwajo)	Kepiting Siwa (Kelompok Peduli Stunting Masyarakat Siwa)	Pelayanan Publik
11	SMP NEGERI SATAP 4 TAKKALLA (Smpsatap4takkalalla)	Program TAQJIL (Tahfidz Quran Jus Tiga Puluh)	Pelayanan Publik
12	SMA 1 WAJO (Sma1.Kabupatenwajo)	Pengelolaan Sampah Berbasis Sekolah Sehat Di Sman 1 Wajo: Inovasi Bekelanjutan Dan Implikasinya	Inovasi Lainnya
13	SMP SATAP Negeri 5 Penrang (Smpsatap5penrang)	Pesan Buah Manis	Pelayanan Publik

14	Smpn 2 Takkalalla (Smpn2takkalalla)	Nafas Gayung Berpayung	Inovasi Lainnya
15	Pkm Salobulo (Pkm Salobulo)	Tobat Sis (Temukan Obati Awasi Sampai Tuntas Tuberculosis)	Pelayanan Publik
16	Pkm Salobulo (Pkm Salobulo)	Si Ceria Ptm (Segeraki Cek Kesehatan Dirita Dari Penyakit Tidak Menular)	Pelayanan Publik
17	Pkm Salobulo (Pkm Salobulo)	Langsing Manis (Layanan Pengobatan Berkesinambungan Pada Masyarakat Penderita Penyakit Kronis/Prolanis)	Pelayanan Publik
18	SMP 3 PAMMANA (Smp3pammana)	AGUS BELA DIRI (Lagu Dan Musik Sumber Belajar Yang Dirindukan)	Inovasi Lainnya
19	SMP 3 PAMMANA (Smp3pammana)	GERKASIH (Gerakan Kamis Bersih)	Inovasi Lainnya
20	SMP 3 PAMMANA (Smp3pammana)	BARTER BU KOS MELAU KESEK (MEMBANGUN KARAKTER DAN BUDAYA POSITIF DI SEKOLAH MELAU KEYAKINAN SEKOLAH)	Pelayanan Publik
21	Puskesmas Pammana (Pkmpammana.Kabupate nwajo)	Pansus Klb (Peningkatan Sistem Surveilans Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa)	Pelayanan Publik
22	Puskesmas Pammana (Pkmpammana.Kabupate nwajo)	Optik Ptm (Optimalisasi Kader Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular)	Pelayanan Publik
23	Pkm Tanasitolo (Pkm Tanasitolo)	Ka'bah (Kelompok Berhaji Sehat)	Pelayanan Publik
24	Pkm Tanasitolo (Pkm Tanasitolo)	Janda-Koe (Jaga Jarak Kehamilan Anda Dengan Alat Kontrasepsi)	Pelayanan Publik
25	Pkm Tanasitolo (Pkm Tanasitolo)	Mobil Pos Pemanis Dht (Mobilisasi Posbindu Pemantauan Kencing Manis Dan Hipertensi)	Pelayanan Publik
26	DINAS KESEHATAN (Dinkes.Kabupatenwajo)	Wangi Sakura (Wajo Tanggulangi Hipertensi Dengan Sadar Ukur Tekanan Darah)	Pelayanan Publik
27	Sma 13 Wajo (Sma13wajo)	Seber Folio (Assesmen Berbasis Portofolio)	Pelayanan Publik
28	Smp 4 Sengkang (Smp4sengkang)	Maradeka Membaca ("Menumbuhkan Minat Literasi Baca Dengan E-Pustaka)	Pelayanan Publik
29	Yayasan Wajo (Yayasanwajo)	Sistem Pemantauan Dan Remediasi Pekerja Anak Berbasis Masyarakat	Pelayanan Publik
30	Fieq Fand Kids School (FieqFandKidsSchool)	Madu (Mainan Anak Daur Ulang) Tk Fieqfand Kids School	Pelayanan Publik

31	Fieq Fand Kids School (FieqFandKidsSchool)	Membangun Karakter Enterpreneur Pada Kelas Inkuler (Inklusi Dan Reguler) Pendidikan Anak Usia Dini	Pelayanan Publik
32	Fieq Fand Kids School (FieqFandKidsSchool)	Siva (Siner Dan Inovasi) Langkah Maju Tk Fieqfand Kids School Dalam Pelukan Teknologi Dan Kemitraan Komunitas	Pelayanan Publik
33	Puskesmas Wewangrewu (Pkmwewangrewu.Kabupatenwajo)	Sikobbi (Sistem Komunikasi Berbasis Surveilans	Pelayanan Publik
34	Puskesmas Wewangrewu (Pkmwewangrewu.Kabupatenwajo)	Gerak Jidat (Gerakan Jamaah Masjid Sehat)	Pelayanan Publik
35	Pkm Majauleng (Pkm Majauleng)	Cucita Mas (Cuci Tangan Masyarakat Sekolah)	Pelayanan Publik
36	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (Dpkp.Kabupatenwajo)	Layanan Inovatif Kesehatan Sapi Bergulir Untuk Rakyat Sejahtera (LINTAS LIAR)	Pelayanan Publik
37	SDN 275 Kalola (Sdn275kalola)	JUMAIDAS (Jumat Tari Daerah Bersama)	Pelayanan Publik
38	SMP SATAP 5 Tanasitolo (Smpsatap5tanasitolo)	HALIMAH (Hijaukan Lingkungan Dengan Mengolah Sampah) Di Satuan Pendidikan Menumbuhkan Kepemimpinan Murid (Student Agency)	Pelayanan Publik
39	SMP Negeri 4 Gilireng (Smp4gilireng)	Ngopi Asik Di Taman KOPI_4G (Ngobrol Pintar Asah Otak Dengan TIK Di Taman Komunitas Praktisi SMPN 4 Gilireng)	Pelayanan Publik
40	SMPN 5 Majauleng (Smpn5majauleng)	Pakkarawata (Penguatan Karakter Siswa Melalui Tahfidz Dan Dai)	Pelayanan Publik
41	Sdn 4 Maddukelleng (Sdn 4 Maddukelleng)	Eks Ktq (Ekstrakurikuler Kelas Tahfidz Al - Quran Uptd Sd Negeri 4 Maddukelleng)	Pelayanan Publik
42	Sdn 4 Maddukelleng (Sdn 4 Maddukelleng)	Paqu (Penggunaan Aplikasi Quizizz Di Class)	Pelayanan Publik
43	Sdn 4 Maddukelleng (Sdn 4 Maddukelleng)	Penglidi (Pengenalan Literasi Digital)	Pelayanan Publik
44	Puskesmas Sabbangparu	Open Capres Ptm (Optimalisasi Penggunaan Carta Prediksi Penyakit Tidak Menular)	Pelayanan Publik
45	Puskesmas Sabbangparu	Gemindu (Gerakan Mobile Posbindu)	Pelayanan Publik
46	Puskesmas Maniangpajo	Makessing (Maniangpajo Kreatif Atasi Stunting)	Pelayanan Publik

47	SMP Negeri 1 Pammana (Smp1pammana)	KAMILAH PASTI (Kebiasaan Memilah Dan Mengolah Sampah Plastik)	Pelayanan Publik
48	Sdn 260 Lalongkoda	Utang Ragi (Ular Tangga Lontara Bugis)	Pelayanan Publik
49	Smp Satap 6 Pammana	Sifat Kamu (Sistem Fasilitasi Kepemimpinan Murid)	Pelayanan Publik
50	Smpn 1 Majauleng	Membatik Sipintar (Membangun Budaya Positif Dan Kebiasaan Siswa Melalui Permainan Ular Tangga Restitusi)	Pelayanan Publik
51	Sd Negeri 266 Pakkana	Program 3s (Selasa Senyum Sehat)	Pelayanan Publik
52	Sd Negeri 331 Tempe	Asesmen Gampin (Game Power Point)	Pelayanan Publik
53	Andibasoarsidin (Andibasoarsidin)	Hi Tag Sutera Ber-Code (Hibrid Hangtag Sutera Berbasis Qr Code): Mengungkap Makna Filosofis Motif Sutera Dalam Menjawab Tantangan Marketing Dan Pola Perilaku Konsumen Sebagai Upaya Mewujudkan Kejayaan Sutera Kabupaten Wajo Di Kawasan Nusantara	Pelayanan Publik
54	Pkm Tosora	Garis Putih (Gerakan Ibu Sadar Pemberian Imunisasi Tepat Si Buah Hati)	Pelayanan Publik
55	Smpn 6 Sengkang	Respek Ka (Reformasi Pengetahuan, Keterampilan Dan Karakter))	Pelayanan Publik
56	Smp2sengkang	Melibas Rayap (Menggunakan Limbah Sabun Basmi Rayap)	Pelayanan Publik
57	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sedari Dini (Sekolah Bugis Internasional Dan Wisata Pendidikan)	Inovasi Lainnya
58	Inspektorat Daerah (Itda)	Cafe Konsultasi (Capsol)	Inovasi Tata Kelola

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Tahun 2024